



A GLOBAL
TOBACCO
INDUSTRY
WATCHDOG



Indeks Interferensi Industri Global Tobacco 2021

Ringkasan
Umum

Ringkasan Umum

Di tengah pandemi global, industri rokok tetap memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk berbahaya mereka meskipun kegiatan merokok menjadi faktor utama yang memperparah COVID-19.

Pemerintah sendiri memiliki wewenang untuk memperketat regulasi terhadap industri rokok pada masa sulit tersebut, namun sayangnya kenyataan berkata lain. Di banyak negara, pemerintah justru melindungi dan bahkan mempromosikan industri rokok. Rokok bertanggung jawab terhadap 8 juta kematian per tahun secara global dan kerugian kesehatan dan produktivitas sebesar \$1,4 miliar tiap tahunnya. Namun, pemerintah dibujuk untuk memenuhi permintaan dan lobi dari industri berbahaya ini dan bahkan menerima dana amal perusahaan seperti yang ditunjukkan dalam Indeks Interferensi Industri Tembakau Global 2021 (Indeks).

Meskipun pemerintah telah mengidentifikasi interferensi industri tembakau sebagai hambatan utama bagi upaya untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian tembakau, pada akhirnya tetap saja banyak yang menjadi rentan terhadap taktik industri, menyerah pada interferensi dan hanya mampu berkompromi dengan kebijakan tersebut untuk melindungi kesehatan masyarakat dari kepentingan komersial.

Beberapa pemerintah terbujuk oleh pembicaraan ganda perusahaan tembakau transnasional seperti Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) dan Japan Tobacco International (JTI), yang menawarkan produk tembakau baru untuk disetujui dan mengklaim bahwa mereka beralih dari produk rokok. Kenyataannya, perusahaan menjual lebih banyak rokok dan sekaligus menghalangi upaya regulasi pemerintah yang akan memengaruhi penjualan rokok tersebut.

TI mengeksploitasi pandemi COVID-19 dengan taktik multi-cabang untuk menarik, membujuk, dan

memaksa pemerintah ke arah kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih lemah. Banyak pemerintah, yang dibuat rentan oleh pandemi, dengan bebas menerima dan mendukung dana amal dari TI, ketika sumbangan semacam itu sering datang dengan pamrih, dan berkompromi dengan kebijakan. Alih-alih menghilangkan manfaat bagi industri, banyak pemerintahan membuat keputusan yang menguntungkan industri, khususnya dalam menurunkan atau tidak mengenakan pajak dan menunda undang-undang atau penerapannya.

Banyak pejabat pemerintah bertemu dengan eksekutif industri secara tidak transparan dan dibujuk untuk mengizinkan bisnis ini berfungsi sebagai "esensial" selama lockdown pandemi. Situasi konflik kepentingan membuat pejabat rentan untuk menerima proposal dari industri dan melihatnya sebagai "mitra" pemulihan ekonomi daripada beban bagi kesehatan masyarakat dan masyarakat secara umum.

Indeks ini, seri ketiga, mencakup **80 negara** yang mendokumentasikan status upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Pasal 5.3. Pasal 5.3 dan Pedomannya menguraikan bagaimana pemerintah dapat melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari kepentingan komersial dan kepentingan TI lainnya dan pihak-pihak yang memajukan kepentingannya. Pemerintah yang mengikuti Pedoman ini lebih mampu mengamankan upaya pengendalian tembakau selama pandemi, sementara pemerintah yang tidak mengikuti pedoman tersebut maka upaya mereka dirusak, ditunda, atau dikalahkan oleh industri.

Ke-80 negara tersebut diurutkan (Gambar 1) menurut skor total yang diberikan oleh kelompok masyarakat sipil, yang menyusun indeks negara masing-masing. Semakin rendah skornya, semakin rendah tingkat interferensi secara keseluruhan, yang merupakan pertanda baik bagi negara tersebut.

Indeks ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada negara yang terhindar dari campur tangan TI, beberapa pemerintah bertindak dengan berani untuk mengatasi interferensi tersebut. Delapan belas negara telah melakukan perbaikan dalam melindungi kebijakan kesehatan, terutama dalam menerapkan transparansi yang lebih besar; tidak bekerja sama dengan industri dan mengadopsi pedoman untuk menyediakan prosedur interaksi dengan industri.

Beberapa pemerintahan membuat kemajuan dalam melindungi kebijakan mereka dari campur tangan industri tembakau:

Botswana menerbitkan undang-undang pengendalian tembakau, yang membatasi interaksi antara pemerintah dan TI dan melarang kemitraan dengan dan memberikan insentif kepada TI. Kementerian Kesehatan **India** mengadopsi kode etik yang membatasi kolaborasi pejabat dengan industri tembakau, sementara Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga **Kamboja** melarang segala bentuk kemitraan dengan TI dengan fasilitas pendidikan.

Kementerian kesehatan, rumah sakit, petugas kesehatan, dan lembaga penegak hukum di banyak negara menjadi sasaran peningkatan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terkait pandemi:

Tujuh negara dilaporkan tidak menerima CSR terkait tembakau, sementara banyak lainnya, termasuk setidaknya enam negara dengan larangan atau pembatasan kegiatan CSR terkait tembakau, dan menerima amal dari industri tersebut selama pandemi. Beberapa departemen kesehatan, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan penyakit terkait tembakau, menyambut baik donasi TI berupa ventilator; alat pelindung diri (APD), dan dana.

Banyak pemerintahan berkompromi dengan kebijakan pajak tembakau:

Setidaknya sebelas negara yang menerima sumbangan CSR dari industri tersebut berkompromi dengan kebijakan pajak. Pemerintah menerima proposal TI menggunakan pandemi sebagai pembenaran untuk menerapkan pajak yang lebih rendah, memberikan jangka waktu yang lebih lama untuk membayar pajak atau tidak menaikkan pajak tembakau. Kenaikan pajak digagalkan di beberapa negara.

Setidaknya 10 pemerintahan menganggap industri tembakau dan rokok “esensial” selama pandemi:

Pemerintah, nasional dan provinsi, mengizinkan TI beroperasi selama pandemi dan beberapa menganggap rokok sebagai barang penting untuk dijual selama lockdown. Pemerintah yang melarang produksi tembakau selama lockdown sering ditentang oleh departemen ramah tembakau untuk membatalkan keputusan mereka atau bahkan dituntut oleh industri tersebut.

TI meyakinkan anggota parlemen di beberapa negara untuk memperlakukan produk tembakau baru secara berbeda dan dengan jaminan lebih menguntungkan:

Anggota parlemen di **Kenya, Lebanon, Mesir** dan **Spanyol** dibujuk untuk mengatur sistem pengiriman nikotin elektronik (ENDS) dan produk tembakau yang dipanaskan (HTP) secara berbeda dari produk tembakau konvensional dan,

dalam beberapa kasus, bahkan membatalkan larangan sebelumnya.

TI menyabotase undang-undang pengendalian tembakau di beberapa negara:

Ada keterlambatan dalam pengajuan undang-undang pengendalian tembakau di **Tanzania** dan **Zambia**, sementara penerapan undang-undang yang ada, terutama peringatan kesehatan bergambar (PHW), ditunda di **Ethiopia, Bolivia**, dan kemasan polos terhenti di **Georgia** dan **Turki**.

Pejabat senior di beberapa negara mempromosikan industri tembakau:

Perusahaan tembakau mendapatkan kunjungan dari kepala negara, menteri atau pejabat tinggi lainnya di **Brasil, Fiji, Jerman, Kenya** dan **Zambia** ke pabrik yang mendukung bisnis mereka dalam upacara peresmian. Publisitas kunjungan ini di media memberikan stempel persetujuan dari pejabat tinggi, yang berujung pada mengkompromikan regulasi. Pejabat senior di **Pakistan, Nikaragua** dan **Polandia** berpartisipasi dalam kegiatan industri yang berkaitan dengan ekonomi.

Pemerintah memalsukan perjanjian alih-alih membuat peraturan:

TI secara efektif mengamankan kerja sama dengan pemerintah di setidaknya sebelas negara melalui perjanjian, program pelatihan, dan kegiatan penegakan hukum, terutama pada perdagangan gelap, berlawanan dengan persyaratan FCTC untuk membatasi interaksi dengan TI hanya jika sangat diperlukan untuk regulasi. Ini termasuk perjanjian untuk mengatasi perdagangan ilegal tembakau di **Kolombia, Republik Dominika, Ethiopia, Itali** dan **Belanda**.

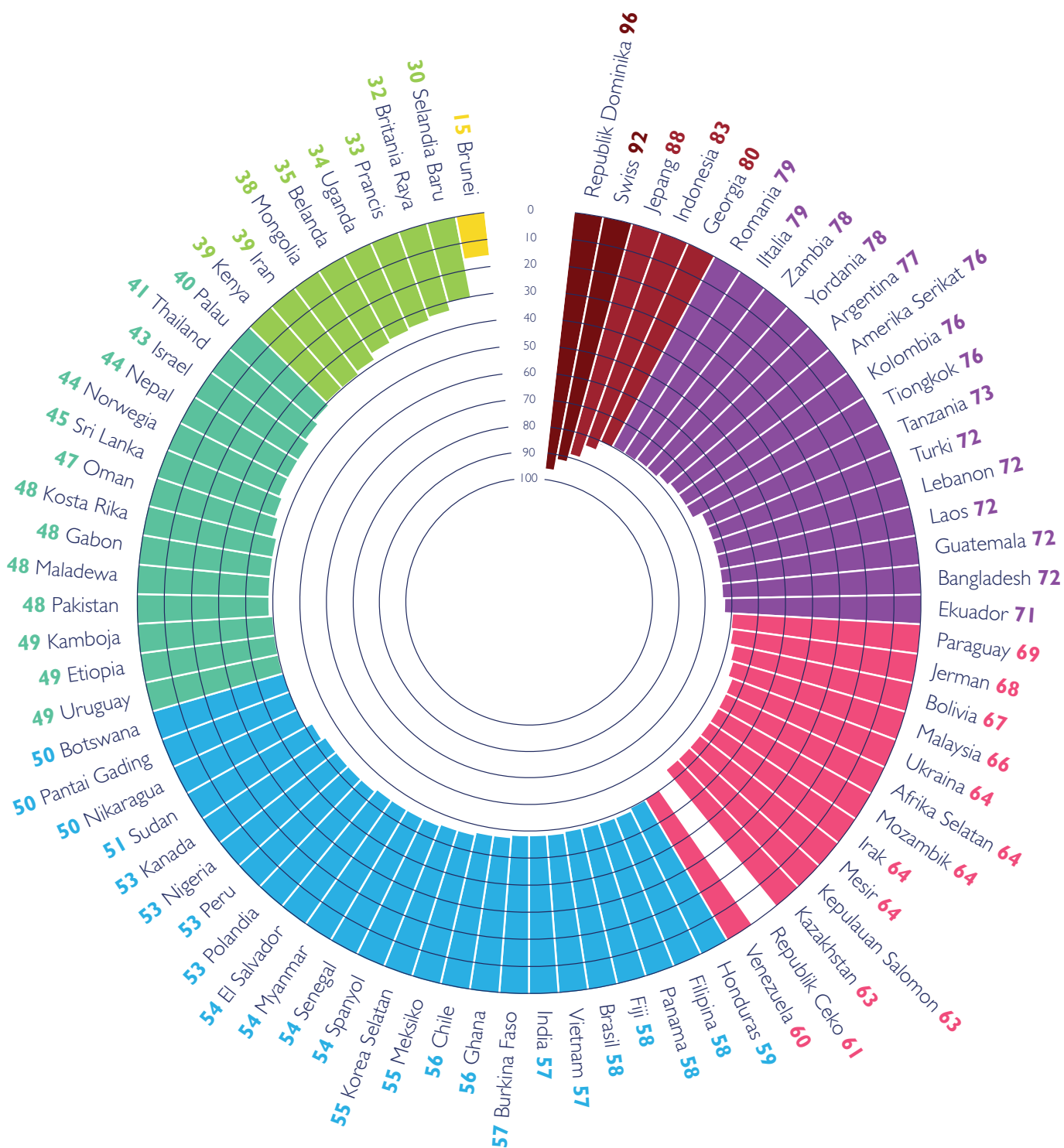
Terdapat konflik kepentingan saat mantan pejabat pindah ke industri, dan eksekutif industri memiliki akses ke pembuatan kebijakan:

Anggota parlemen membuat diri mereka rentan terhadap interferensi industri dengan menerima sumbangan politik, terlibat langsung dalam bisnis tembakau atau melalui “revolving door” mantan pejabat publik yang bergabung dengan TI dan sebaliknya. Sembilan negara melaporkan masalah revolving door; mengakibatkan mantan eksekutif perusahaan tembakau di **Argentina, Kolombia, Fiji, Georgia**, dan **Paraguay** diangkat sebagai pejabat publik senior.

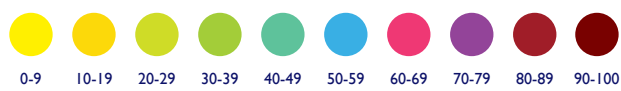
Non-Pihak menghadapi gangguan tingkat tinggi:

Lima negara yang tetap bukan Pihak WHO FCTC, yaitu **Argentina, Republik Dominika, Indonesia, Swiss** dan **U.S.A**, menghadapi gangguan TI tingkat tinggi yang merusak hasil pengendalian tembakau.. Pemerintah tersebut mendorong bisnis tembakau dengan memberikan insentif, mempertahankan undang-undang yang ramah industri dan mempromosikan TI secara internasional.

Gambar I: Industri tembakau mengganggu peringkat negara secara keseluruhan



Semakin rendah skornya,
semakin baik peringkatnya



Rekomendasi

Menghentikan gangguan TI merupakan kewenangan pemerintah. Semakin cepat pemerintah bertindak, semakin baik pula dalam melindungi dan memajukan kebijakan pengendalian tembakau tersebut. Pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi dalam Pasal 5.3 Pedoman yang menyerukan kepada pemerintah untuk membatasi interaksi dengan industri hanya jika benar-benar diperlukan dan harus transparan. Tindakan khusus termasuk hal-hal berikut:

- 1. Seluruh pemerintah, bukan hanya sektor kesehatan, harus menertibkan campur tangan industri tembakau.** Untuk mengurangi kerentanan terhadap campur tangan industri, diperlukan pendekatan seluruh pemerintah untuk menerapkan Pasal 5.3 seperti yang dilakukan di Botswana, Filipina, dan Inggris.
- 2. Pengesahan kegiatan industri tembakau harus dihentikan.** Pemerintah harus membatasi interaksi dengan TI hanya jika sangat diperlukan untuk regulasi dan tidak mendukung industri yang menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat.
- 3. Denormalisasi dengan apa yang disebut sebagai kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial dari industri tembakau.** Pemerintah harus menolak kegiatan CSR karena ini adalah bentuk promosi tembakau dan mengompromikan integritas pejabat pemerintah untuk mengatur tembakau ketika mereka mendukung kegiatan CSR terkait tembakau.
- 4. Menolak perjanjian yang tidak mengikat dengan industri tembakau.** Pemerintah seringkali dirugikan ketika menyetujui untuk bekerja sama dengan TI. Seharusnya tidak ada kolaborasi antara pemerintah dan TI.
- 5. Menghentikan pemberian insentif kepada industri rokok.** TI tidak boleh diberikan insentif atau perlakuan istimewa untuk menjalankan usahanya, yang bertentangan langsung dengan kebijakan pengendalian tembakau.
- 6. Pemerintah harus melepaskan diri dari industri tembakau.** Badan usaha milik negara harus diperlakukan seperti TI lainnya. Divestasi dari bisnis tembakau meningkatkan kemandirian pemerintah dari industri sehingga mereka dapat bertindak bebas untuk melindungi kesehatan masyarakat.
- 7. Membutuhkan transparansi yang lebih besar untuk meningkatkan akuntabilitas.** Transparansi saat berurusan dengan TI akan mengurangi kasus interferensi jika pejabat pemerintah dan industri dimintai pertanggungjawaban. Semua interaksi dengan TI harus direkam dan tersedia untuk umum.
- 8. Menerapkan kode untuk menyediakan firewall.** Untuk membatasi interaksi dengan TI, menghindari konflik kepentingan dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus mengadopsi kode etik dengan pedoman yang jelas tentang interaksi dengan TI.
- 9. Paksa industri tembakau untuk memberikan informasi tentang bisnisnya.** Industri tembakau harus dibuat untuk melaporkan pengeluarannya secara terbuka dalam kegiatan pemasaran, lobi, dan filantropi.

Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), mitra STOP, memanfaatkan laporan masyarakat sipil tentang pengaruh industri tembakau dari 80 negara yang mencakup sekitar 83% populasi dunia. Indeks Interferensi Industri Tembakau Global adalah survei untuk menentukan bagaimana pemerintah melindungi kebijakan kesehatan publik dari kepentingan komersial dan pribadi industri tembakau sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO FCTC). Laporan negara terperinci dan perangkat lainnya tersedia di: www.globaltobaccoindex.org